PERMASALAHAN USAHA SAPI POTONG KAITANNYA DENGAN POTENSI SUMBER DAYA LOKAL MODAL SOSIAL DAN POSISI TAWAR PETERNAK DALAM PERSPEKTIF SOIOLOGIS

M. Munandar Sulaeman
Laboratorium Sosiologi-Penyuluhan Fak.Peternakan Unpad Bandung,Jln Raya Bandung Sumedang Km 21 Tlp (022) 7798241, Fax (022) 7798212 Jatinangor Sumedang E-mail mdr_sul@yahoo.com

Pengembangan Peternakan Berkelanjutan : Sistem Produksi Berbasis Ekosistem Lokal

Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : permasalahan substantive peternak sapi potong; peyebab atau akar permasalahannya, pengembangan peternakan berkelanjutan melalui pemberdayaan modal sosial dan kelembagaan sebagai sumberdaya lokal. Metode kajian dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumen. Analisis dilakukan dengan pendekatan teori sosial kritis dan konstruktivis. Hasil penelitian menunjukkan fenomena permasalahan yang dihadapi peternak lebih dominan berkaitan dengan aspek non-zooteknis, terkait dengan variable sosiologis berupa : ketahanan sosial (social sustainability), lemahnya posisi tawar, politik ekonomi yang tidak mendukung peternak serta bias kelembagaan peternakan. Solusi yang ditawarkan adalah meningkatkan kekutan modal sosial dan posisi tawar peternak sebagai alternative penyelesaian masalah lemahnya posisi tawar, tekanan politik ekonomi dan bias kelembagaan dalam pengembangan peternakan.
Kata kunci : **Modal sosial, kemitraan, posisi tawar.**

Abstruct

THE RELATIONS OF CATTLE PROBLEM WITH SOCIAL CAPITAL OF LOCAL RESOURCES AND FARMER BARGAINING POSITION IN SOCIOLOGICAL PERSPECTIVE

This study aims to determine: the substantive issues of beef cattle breeders, the cause or root of the problem, the development of sustainable agriculture through institutional empowerment and social capital as a local resource. Methods The study was conducted with the case study and study of literature and document study. The analysis was performed with the approach of critical social theory and constructivist. The results showed the phenomenon of the problems faced by farmers is a more dominant aspect associated with non-zooteknis, related to sociological variables such as: social security (social sustainability), a weak bargaining position, the political economy that does not support cattle ranchers and institutional bias. The solution offered is to increase social capital and the bargaining position of farmers as an alternative solution to the weak bargaining position, the economic political pressures of economic development and institutional bias of livestock.
Key note : The problem, social capital, bargaining position

Pendahuluan.

Menakar struktur pemaknaan politik pembangunan peternakan di segala lini pada dewasa ini lebih didominasi oleh segi ekonomi. Fenomena pembangunan peternakan lebih difokuskan pada upaya program dan kegiatan ekonomi dengan target utama keberhasilan ekonomi berupa peningkatan pendapatan. Hal demikian wajar karena indek pembangunan manusia salah satu sasarannya adalah peningkatan pendapatan (ekonomi). Padahal substansi peternakan terdiri dari manusia peternak (makna dan arti, pengetahuan, perilaku), institusi (kelembagaan social-ekonomi) dan ternak (komoditas). Sehingga wajar apabila kebijakan pembangunan peternakan memperhatikan pula program dan kegiatan yang berdimensi sosial. Pemaknaan politik pembangunan peternakan yang berjalan sekarang dominan pada pendapatan yang dianggap sebagai akibat utama dari kebijakan, program dan kegiatan berupa input variable tekonologi dan ekonomi berupa modal (finansial). Padahal menurut pernyataan proposisi berlaku bahwa pendapatan sebagai refleksi dari potensi manusia peternak berupa modal sosial dan kelembagaannya, selain berbagai faktor modal ekonomi. Kenyataan permasalahan yang dihadapi peternak kecenderungannya lebih banyak berkaitan dengan politik ekonomi dan bias kelembagaan yang menimbulkan adanya ekploitatif, dominatif, dan posisi tawar yang tidak seimbang.

Logika ekonomi yang berlaku sekarang telah mengabaikan logika sosial (institusi sosial), dimana kelembagaan peternakan didikte oleh kepentingan pemodal, seperti tindakan : inportir , bandar dan pelaku ekonomi lainnya yang mendikte kepentingan dan logika ekonomi peternak. Untuk meyakinkan kontribusi aspek sosial dalam pembangunan peternakan, maka perlu di elaborasi permasalahan substantive peternak sapi potong; peyebab atau akar permasalahan, pengembangan peternakan berkelanjutan melalui pemberdayaan modal sosial dan kelembagaan sebagai sumberdaya lokal.

Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan metode studi kasus (data mikro) dan studi kepustakaan /dokumen (data makro). Studi kasus berupaya mengungkap secara holistik (utuh), mengungkap kesan, pesan ekspresi dan proses sesuatu dari subyek yang diteliti; Selanjutnya dianalisis secara mendalam (verstehen). Studi dokumentasi/kepustakaan adalah mempelajari isi/konten dari dokumen atau berita media yang relevan. Konsep yang dikaji adalah: permasalahan substantive peternak sapi potong; peyebab atau akar permasalahan, pengembangan peternakan berkelanjutan melalui pemberdayaan modal sosial dan kelembagaan sebagai sumberdaya lokal.

aspek sosial, politik ekonomi peternakan dalam konteks kelembagaan yang muncul pada tingkat mikro (peternak) dan berupa fenomena fenomena yang terjadi pada masyarakat peternak sapi potong. Kajian secara mikro dilakukan studi kasus di Desa Karang Kecamatan Parigi Kabupaten Ciamis, yang meliputi tiga dusun yaitu : Dusun Astamaya, Dusun Bojong Salawe dan Dusun Buni Ayu. Kajian secara makro dilakukan studi dokumen tahun 2009-2010. Pendekatan penelitian dilakukan dengan dua yaitu paradigma kritis dan konstruktivis. Paradigma kritis (merupakan kombinasi teknik filosofis dan sosialsaintifik) langkah analisisnya (asumsinya) bahwa: pengetahuan merupakan hasil konstruksi ilmuwan dan teori yang membuat asumsi

tertentu tentang dunia, dan masyarakat sebagai historisitas (terus mengalami perubahan). 2) Masa kini penuh dominasi, eksploitasi dan penindasan.3) Dominasi bersifat struktural, masyarakat dipengaruhi struktur sosial yang lebih besar seperti politik. 4) Struktur dominasi direproduksi melalui kesadaran palsu manusia, seperti ideologi, reifikasi, hegemoni, pemikiran satu dimensi dan metafisika keberadaan. 5) Perubahan sosial dimulai dari kehidupan seharai hari. 6) Gambaran hubungan manusia dengan struktur seperti dialektika. 7) Atas dasar dialektika maka manusia bertanggungjawab penuh atas kebebasan mereka. Paradigma konstruktivis kerangka konsepnya adalah membangun atau mengkonstruksi struktur dengan sitematis dengan cara memahami ”makna tindakan sosial yang penuh arti”, dalam setting kehidupan sehari-hari (masyarakat peternak) yang wajar. Bagaimana para pelaku sosial memelihara dan mengelola dunia sosial kehidupan sehari-harinya, untuk kemudian menafsirkannya. Penafsiran dapat dilakukan dengan ”grounded theory” (teori beralas), artinya kumpulan data yang diperoleh dikonstruksi sehingga menghasilkan suatu teori. Proses demikian adalah menyususn teori secara induktif dari sekumpulan data, prinsip kerjanya adalah menemukan proses dominan dari suatu pola sosial.
Variabel penelitian / Konsep sosial yang dikaji meliputi:

Hasil dan Pembahasan

Hasil kajian secara mikro dan makro tentang permasalahan substantive peternak sapi perah dan sapi potong dalam perspektif sosiologis serta solusinya, dalam rangka pembangunan peternakan berkelanjutan melalui pemberdayaan modal sosial sebagai sumberdaya lokal.

Fenomena permasalahan peternakan

Pengembangan peternakan sapi potong tidak hanya terkait dengan aspek ekonomi tetapi berkaitan juga dengan masalah sosial, modal sosial dan kelembagaan.

tidak lepas dari berbagai permasalahan sosial, dimana permasalahan tersebut jarang disentuh dan jarang dijadikan fokus perhatian kajian utama, karena terkalahkan oleh masalah ekonomi. Padahal masalah sosial seperti kelembagaan atau kepercayaan berimplikasi ahir pada nilai ekonomi. Permasalahan peternakan pada saat ini sebagai berikut :

a. Peternakan sapi perah : masalah krusial yang dihadapi peternak sapi perah adalah “*kebijakan sepihak*” harga jual susu yang diatur oleh IPS. Peternak menjadi bemper IPS. IPS yang punya masalah, tetapi peternak yang mendapat getahnya. Jadi masalahnya adalah masalah sosial berupa lemahnya posisi tawar peternak dalam lembaga kerjasama peternak dengan IPS dan system pertukaran yang tidak jelas dan lemahnya system yang dibangun dalam kerjasama. Fenomena permasalahan kelembagaan persusuan yang mencuat ke media massa menunjukkan hal sebagai berikut:

Tabel 1. Permasalahan klasik peternak sapi perah

No	Peta Permasalahan	Kaitan Masalah	Resistensi Peternak
1	*Pada Peternakan (hulu):*		-Pengalihan usaha produksi

	-Harga jual susu rendah -Sanitasi penanganan susu buruk (sehingga kualitas susu turun) -Harga pakan tambahan konsentrat tinggi -Produksi dan kualitas yang stagnasi -Skala usaha rendah (inefisiensi ekonomis) -Daya serap teknologi rendah -Pakan hiajaun ternak terbatas -Terbatas modal usaha -Pasokan susu ke IPS menurun -Harga susu cenderung selalu dibawah biaya produksi -Sapi yang dipelihara adalah sapi keturunan bukan “final stock” -Peternak kehidupannya tergantung kepada usaha ternak	-Zooteknis -Zooteknis -Kebijakan Pemerintah -Zooteknis -Manajemen-modal usaha -Penyuluhan -Manajemen-modal usaha - -Zooteknis -Zooteknis -Zooteknis -Kondisi eksis	susu, menjadi usaha penggemukan dengan membeli sapi anak yang disusukan ke induk yang sedang menyusui selama tiga bulan dan dijual -Peternak menjual sapi pada saat biaya pakan tinggi
2	*Di luar Peternak (Koperasi)* -Transparansi - Harga pakan	-Modal sosial	-Karena harga pakan tinggi maka peternak tidak setor produksi kepada KUD, tapi dijual ke agen lain
3	*Di luar Peternak (IPS)* -Harga penerimaan susu rendah -Tidak ada kouta menyerap susu dari peternak	-Zooteknis -Susu Inport -SK.Pemerintah	-Pemalsuan air susu
4	*Pemerintah (Departemental)* -Tidak berpihak kepada peternak, SKB IPS menyerap susu dari peternak dicabut	-Struktur kebijakan -Kebijakan susu Inport	-Membuang susu ke sungai (kasus lama)

Sumber Informasi : Harian Kompas, PR, Tribun, Pikiran Rakyat Tahun 2003- 2009.
Catatan : Masalah peternak sapi perah dari tahun ke tahun adalah masalah klasik

b. Peternakan ayam rasa terikat oleh *system kartel* perdagangan berupa siklus pengadaan DOC, pakan pabrik, dan obat obatan yang dikuasai pengusaha dan jaringan kartel. Hal yang sama substansi masalahnya adalah posisi tawar peternak terhadap pemodal besar.
c. Peternakan domba rakyat terbentur masalah harga jual yang *didikte para bandar*. Hal demikian kaitannya dengan kelembagaan pemasaran atau uasaha bersama.

d. Peternakan sapi potong, permasalahnnya adalah masih rendahnya produksi dan belum memenuhi kebutuhan konsumsi daging (kekurangan 33,8 %, APFINDO,2009). Fenomena di lapangan permasalahan peternakan sapi potong adalah sulitnya bibit atau bakalan, karena ada sementara *pemodal lokal* pedesaan yang melakukan pembelian bibit sapi potong.

Dari fenomena permasalahan peternakan berupa : kebijakan sepihak, system kartel, didikte bandar dan dominasi pemodal. Semuanya merupakan variable sosial tentang kelembagaan, yang perlu direkontruksi secara ketat sehingga merupakan system pembangunan berkelanjutan.

Aspek Substantif Pola Kemitraan (Posisi TawarYang Tidak Seimbang)

Maksud dari studi awal ini adalah untuk mencoba mengelaborasi pembangunan peternakan spesifik pola kemitraan dengan kajian kritis teori sosiologis, yang sampai saat ini masih dirasakan kurang. Untuk kepentingan tersebut, maka perlu menelusuri aspek substantif segi sosiologis pola kemitraan dan segi teori formal sosiologis yang mungkin dapat mengelaborasi kegiatan tersebut.

Pola kemitraan yang berlangsung saat ini adalah dua pihak yang bermitra usaha ternak yaitu inti dan plasma. Inti sebagai provider atau penyedia sarana produksi memberikan sarana produksi peternakan yang akan dikelola oleh peternak, dan peternak dengan jaminan tersedia kandang (terkadang juga jaminan sertifikat lahan) dan tenaga kerja berkewajiaban menghasilkan produksi dengan ketentuan dan cara yang sudah diskenario pengusaha. Gambaran proses kemitraan cara demikian, menimbulkan peluang lebih besar bagi pemodal untuk melakukan politik ekonomi kemitraan dibanding dengan peternaknya sendiri. Pihak tertentu dapat saja menjastifikasi bahwa selayaknya pemodal bertindak demikian, karena pemodal yang lebih besar memberikan kontribusi finansial berjalannya suatu usaha ternak juga termasuk pemasaran. Tetapi kaum kapitalis harus berpikir siapa yang berjasa menghasilkan sejumlah produksi ternak sehingga keuntungan terbesarnya mengalir ke pemodal. Padahal kalau tidak ada jasa peternak produksi tidak akan berjalan dan tidak akan dihasilkan atau tidak akan mengalir ke kapitalis, sehingga hasil dari produksi ini harus bermakna hubungan sosial (social relations of production). Inilah pertimbangan segi sosiologis (tidak selalu ekonomis), bahwa hasil jasa kerja peternak itu harus mengalir secara wajar baik ke peternak maupun ke kapitalis. Kemitraan perlu mempunyai visi bahwa hasilnya dalam rangka mensejahterakan peternak dan bebas dari garis kemiskinan. Jadi yang perlu dikembangkan adalah jasa sosial yang ditanam dalam proses produksi harus menjadi ukuran dan mendapat penghargaan, bukan jasa besarnya finansialnya saja yang ditanam dalam suatu usha ternak kemitraan. Karena walaupun bagaimana peternak kecil itu tidak punya modal dan usahanya dapat berjalan kalau didongkrak dengan modal besar.

Sistem Pembangunan Peternakan Berkelanjutan Melalui Penguatan Kelembagaan dan Modal Sosial

Menyusun pembanguan peternakan yang berkelanjutan diperlukan pemahaman konsep dan kesediaan untuk tidak rakus dalam mencari keuntungan, artinya ada kesediaan untuk niat baik ikut membantu mensejahterakan masyarakat. Artinya

pertimbangan ekonomis dalam pola kemitraan bukan segalanya tetapi pertimbangan sosial juga harus menjadi standar.

Beberapa konsep pembangunan berkelanjutan dijelaskan sebagai berikut :

a. Aliran nilai tambah menyatakan bahwa kemampuan sebuah program pembangunan untuk menghasilkan nilai tambah yang cukup kuat untuk pembangunan lebih lanjut.(Michael Cernea)

b. Aliran lingkungan menyatakan bahwa proses pembangunan berkelanjutan adalah mengoptimalkan manfaat dari sumberdaya alam dan sumberdaya manusia secara serasi, berkesinambungan.

c. Aliran pluralis menyatakan bahwa proses pembangunan yang berdimensi plural (poleksosbud agama) dengan tiga pilar, demokratis, populisme dan keadilan sosial dan partsispatif

Berbagai aliran tersebut dapat dijadikan satu pemahaman pembangunan yang memanfaatkan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia secara optimal dan sekaligus memelihara keseimbangannya dalam rangka memelihara kelestarian atau ketahanan (sustainability) fisik dan ketahanan sosial (social sustainability).

Variabel sosial berupa modal sosial yang Pemberdayaan sumberdaya lokal berupa modal sosial akan memperkuat kelembagaan dan pembangunan akan berkelanjutan berupa adanya nilai tambah, demokratis, partisipatif dan keseimbangan pembangunan sumberdaya fisik dan sumberdaya manusia. Modal sosial dalam pola kemitraan adalah terbentuknya mekanisme kerja kemitraan yang mencerminkan peran aktif dan partisipasi peternak sebagai anggota kemitraan. Adanya nilai kejujuran (trust) dalam diri peternak yang diperankan dalam mengelola ternak dan dalam berpartisipasi pada pola kemitraan.

(Fukuyama,1995). Konsep tersebut adalah meliputi pranata sosial (social institution), yang merupakan wadah berbagai kegiatan masyarakat untuk mencapai berbagi tujuannya dengan segala aspek normanya.

Kepercayaan ini menurut Sztomka (1992) meliputi tindakan manusiawi bukan kejadian alamiah, penuh keyakinan, tindakan bersama, komitmen terhadap tindakannya dan harapan dengan peluang yang pasti. Nampak bahwa modal sosial berkaitan dengan keharusan untuk bertindak secara rasional, dengan motivasi yang kuat dan pertimbangan matang. Tujuan dari kepercayaan adalah keteraturan sosial secara demokratis, mengacu kepada bagian-bagian kelembagaan sosial dalam masyarakat. menempatkan kepercayaan pada keahlian, menempatkan kepercayaan pada organisasi yang kongkrit, menempatkan kepercayaan dalam produk, menenpatkan kepercayaan pada peran-peran sosial dan menempatkan kepercayaan dalam kepribadian Sztomka (1992).

Dimensi modal social dijelaskan Bain dan Hicks (2000) yaitu dimensi kognitif dan struktural. Pada tingkat makro meliputi : disentralisasi, aturan/undang-undang, tipe penguasa, partisapasi dan proses pembuatan kebijakan dan kerangka hukum. Selanjutnya Norman Uphoff (2000) memberikan kategori dimensi kognitif dan struktural yang dilihat dari sumber/manifestasi, domain, faktor dinamis dan unsur umum. Kemudian membuat garis kontinum dari kualitas modal sosial mulai dari yang minimum, rendah, sedang dan tinggi. Demikian pula modal sosial meliputi koproduksi (coproduction) yaitu suatu proses yang mencerminkan adanya peran aktif suatu kelompok masyarakat dalam penyediaan barang dan pelayanan yang ditujukan untuk kepentingan mereka.

Pemberdayaan sumberdaya lokal berupa modal sosial akan memperkuat kelembagaan dan pembangunan akan berkelanjutan berupa adanya nilai tambah, demokratis, partisipatif dan keseimbangan pembangunan sumberdaya fisik dan sumberdaya manusia. Modal sosial dalam pola kemitraan adalah terbentuknya mekanisme kerja kemitraan yang mencerminkan peran aktif dan partisipasi peternak sebagai anggota kemitraan. Adanya nilai kejujuran (trust) dalam diri peternak yang diperankan dalam mengelola ternak dan dalam berpartisipasi pada pola kemitraan.

Sejalan dengan konsep pembangunan tersebut maka pembangunan peternakan yang berkelanjutan melalui pola kemitraan, perlu mempertimbangkan aspek mekanisme kerja kelembagaannnya. Pihak yang terlibat pemodal, peternak dan mekanisme kerjanya harus sinergi dalam arus informasi dan energi yang seimbang dan harmonis.

Contoh konsep pembangunan peternakan berkelanjutan dalam kemitraan peternakan sapi perah berikut :

Upaya restrukturasi kelembagaan substansinya adalah “harga” input dan output yang dihasilkan melalui meknisme kegiatan kelembagaan partisipatif dan penciptaan posisi tawar yang seimbang. Oleh karena itu perlu ada restrukturasi harga jual susu. Harga dalam ekonomi sama dengan norma dalam sosiologi yang mengatur perilaku dan tatakrama. Sehingga harga itu harus merupakan hasil kesepakatan (transaksi). Transaksi tersebut merupakan pertukaran (exchange) nilai. Maksud pertukaran nilai adalah setiap pelaku kelembagaan persusuan akan komitmen bertransaksi dan kerjasama saling menguntungkan apabila didasarkan pada adanya kesepakatan nilai, norma aturan. Kesetabilan ekonomi dan sosial dari hulu sampai hilir terjadi apabila harga pasar yang umum (kesepakatan) mengatur perilaku ekonomi pelaku kelembagaan persusuan; status quo kelembagaan persusuan diakui. Pada kondisi anomali atau inflasi maka harga pasar kehilangan fungsi pengaturannya. Atas dasar tesis demikian maka restrukturasi kelembagaan persusuan diperlukan adanya “konvensi harga” mengenai input dan output diantara para pelaku kelembagaan persusuan. Untuk mencapai konvensi harga riil silahkan perhitungkan secara ekonomis sebagai dasar penetapannya yang dijastifikasi secara sosial (diterima semua pihak). Artinya ada konvensi bakal keutungan yang akan diterima dengan pertimbangan indikator dalam pola kemitraan ingin mensejahterakan peternak. Pembangunan berkelanjutan dengan : Penciptaan Mekanisme Partisipatif dan Posisi Tawar Seimbang. Kondisi partisipatif dan posisi tawar seimbang akan dicapai apabila ada sinergi dalam Kebijakan/tupoksi (regulator) program, kelembagaaan persusuan (operator) dan peternak (stakeholder) serta tidak ada kepentingan politik seperti gambar berikut:

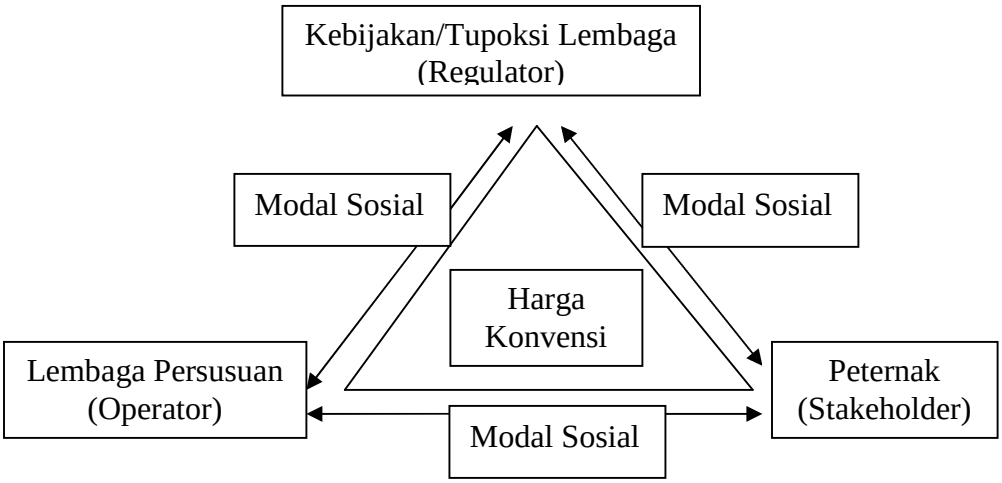

Mekanisme kerjanya :

Kebijakan atau tupoksi (regulator) persusuan merupakan hasil kesepakatan semua stakeholder dan unsur kelembagaan (hanya ada satu kespakatan harga). Lembaga persusuan (Koperasi, GKSI, IPS/Industri Pengolahan Susu) harus mampu mengoperasikan pesan-pesan regulator. Lembaga persusuan mempunayi kewajiban memenuhi harapan dan keinginan stakeholder.Kebijakan tupoksi kelembagaan persusuan harus dapat dijalankan secara normal oleh kelembagaan persusuan. Modal sosial berupa kejujuran, kerjasama untuk menyelesaikan masalah bersama diutamakan dalam kemitraan.. Pemberdayaan sumberdaya lokal berupa modal sosial akan memperkuat kelembagaan dan akan berkelanjutan berupa adanya nilai tambah, demokratis, partisipatif dan keseimbangan sumberdaya fisik dan sumberdaya manusia. Modal sosial dalam pola kemitraan adalah terbentuknya mekanisme kerja kemitraan yang mencerminkan peran aktif dan partisipasi peternak sebagai anggota kemitraan. Adanya nilai kejujuran (trust) dalam diri peternak yang diperankan dalam mengelola ternak dan dalam berpartisipasi pada pola kemitraan.

Untuk komoditas ternak lainnya sapi potong, unggas atau domba maka mekanisme kerjanya sama seperti gambar bagan diatas, dimana modal sosial dijadikan dasar dalam mekanisme kerja sinergi antara peternak, lembaga kemitraan dan kebijakan/peraturan lemabaga sebagai regulator. Pemikiran konsep ini perlu diujicobakan dalam program pembangunan peternakan.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Fenomena permasalahan yang muncul pada kelembagaan adalah bersifat klasik yang dominan terkait dengan “eksisting condition” peternak sebagai masalah klasik sapi perah adalah aspek zooteknis, yaitu kaitan antara aspek biologis ternak dan keterampilan beternak .
2. Anomali kelembagaan baik persusuan atau komoditas ternak lainnya terjadi apabila “harga” input dan output, tidak memuaskan bagi seluruh pelaku kegiatan. Kondisi demikian dapat dicapai apabila modal peternak sebagai

bagian dari sistem kegiatan kelembagaan persusuan dari hulu sampai hilir dapat berpartisipasi dan mempunyai posisi tawar yang setara.

3. Restrukturasi kelembagaan persusuan memerlukan adanya "konvensi harga" mengenai input dan output diantara para pelaku kelembagaan persusuan yang dapat dilakukan dengan adanya kondisi partisipatif dan posisi tawar seimbang dan akan dicapai apabila ada sinergi dalam Kebijakan/tupoksi (regulator) program, kelembagaaan persusuan (operator) dan peternak (stakeholder) serta tidak ada kepentingan politik.
4. Pemberdayaan sumberdaya lokal berupa modal sosial akan memperkuat kelembagaan dan pembangunan akan berkelanjutan karena adanya nilai kejujuran (trust), kebersamaan dan tanggung jawab dalam menyelesaikan masalah bersama yang diperankan dalam mengelola, regulator kemitraan oleh stakeholder maupun provaider.

Saran

Konsep kelembagaan kemitraan dengan indikator pengembangan modal sosial perlu diaplikasikan melalui ujicoba kajian secara mikro untuk kemudian dikembangkan secara makro.

Daftar Pustaka

Citambar, 1972 Iroductory Rural Sociology. Weley Eastern Privet Limited New Delhi

Carnea, 1989 Dalam Sosiologi Modernisasi, Editor Attir dkk., terjemahan Hadikusumo. PT Tiara Wacana Yogyakarta.

Colleman, James S. 2000. Social *Capital in The Creation of Capital in The Creation of Human Capital.* The World Bank Washington DC Hal.13

Dagupta and Serageldin. 2000. *Social Capital.* The World Bank. Washington DC.

Esman, 1971. Dalam Easton, *Pembangunan Lembaga Dan Pembangunan Nasional*. Terjem Gurino. Penerbit UI Press Jakarta

Fukuyama Francis. 1995. *Trust: The Social Vertue and The Creation of Prosperaty*. New York: Free Press.

Horton, 1964. Sociology, New York . The Grow Hill

Landis, 1958. *Introductory Sociology*. New York , Ronal Press

Munandar Sulaeman, 2002. *Dinamika Masyarakat Transisi*. Penerbit Pustaka Pelajar Yogyakarta

Colleman, James S. 2000. Social *Capital in The Creation of Capital in The Creation of Human Capital.* The World Bank Washington DC Hal.13

Putnam R. 1993. *The Prosporous Community, Social Capital and Publik Life*. The American Prospect, 13-65-78.